



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
**UNIT KERJA** : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AGUS SALIM**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**
3. NHK : **454619**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.117.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/36 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. Tanah Seluas 1325 m2 di TEGAL, WARISAN Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 9686 m2 di TEGAL, WARISAN Rp. 82.000.000
4. Tanah Seluas 6721 m2 di TEGAL, WARISAN Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 12399 m2 di TEGAL, WARISAN Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 7562 m2 di TEGAL, WARISAN Rp. 70.000.000
7. Tanah Seluas 458 m2 di TEGAL, WARISAN Rp. 15.000.000
8. Tanah Seluas 189 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
9. Tanah Seluas 917 m2 di TEGAL, WARISAN Rp. 20.000.000
10. Tanah Seluas 11432 m2 di TEGAL, WARISAN Rp. 80.000.000
11. Tanah Seluas 6865 m2 di TEGAL, WARISAN Rp. 35.000.000
12. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
13. Tanah Seluas 200 m2 di REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 205.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.5 G Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOBIL, SUZUKI KATANA / VEGA Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	18.700.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.340.700.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.340.700.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.